



This is an open access article under
CC-BY-SA license

* Corresponding Author

PENGALAMAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DALAM MENAVIGASI KEMANDIRIAN SOSIAL EKONOMI MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Sri Rahayu Ningsih^{*1}, Wahyuni Ilhamis Sholihah²,
Indi Ayu Maretia³, Yulina Eva Riany⁴
IPB University, Indonesia

Email: ^{1*}srningsih@apps.ipb.ac.id, ²wahyuniilhamissholihah@apps.ipb.ac.id,
³maretiaindi@apps.ipb.ac.id, ⁴yriany@apps.ipb.ac.id

Abstract. The Family Hope Program (PKH) is a conditional social assistance program launched by the Indonesian government to support underprivileged families through cash transfers directed at improving access to education, health, and the economy. In 2020, the government allocated IDR 36.9 trillion in funds for 10 million recipient families as part of a strategy to accelerate poverty alleviation. However, in practice, some families remain recipients for years without experiencing significant improvements in their social and economic conditions. Using a phenomenological approach, this study involved six informants selected through purposive sampling based on inclusion criteria. The results show that KPM's understanding of the Family Hope Program (PKH) is generally functional, with a focus on children's educational needs. In the aspect of socio-economic independence related to irregular income, lack of access to productive businesses, increased social participation and interaction, the dynamics of social stigma, the strategic role of assistants, social solidarity, and changes in social identity and self-confidence. Socio-economic challenges, self-awareness and empathy values, the role of assistants, structural limitations of the program, as well as family and neighborhood support.

Keyword: Beneficiary families, phenomenological approach, family hope program, poverty reduction, socio-economic self-sufficiency.

Abstrak. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung keluarga prasejahtera melalui transfer tunai yang diarahkan pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp36,9 triliun bagi 10 juta keluarga penerima, sebagai bagian dari strategi percepatan pengentasan kemiskinan. Namun, dalam praktiknya, sebagian keluarga masih tetap menjadi penerima bantuan selama bertahun-tahun tanpa mengalami peningkatan signifikan dalam kondisi sosial dan ekonomi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam proses menuju kemandirian sosial-ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, penelitian ini melibatkan enam informan yang dipilih melalui purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman KPM terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya bersifat fungsional, dengan fokus pada kebutuhan pendidikan anak. Pada aspek kemandirian sosial ekonomi terkait dengan penghasilan tidak tetap, minimnya akses terhadap usaha produktif, peningkatan partisipasi dan interaksi sosial, dinamika stigma sosial, peran strategis pendamping, solidaritas sosial, serta perubahan identitas sosial dan kepercayaan diri. Tantangan sosial ekonomi, kesadaran diri dan nilai empati, peran pendamping, keterbatasan struktural program, serta dukungan keluarga dan lingkungan dapat menjadi faktor pendorong dan penghambat bagi KPM untuk graduasi mandiri.

Kata Kunci: Bantuan sosial, KPM, studi fenomenologi, kemandirian sosial ekonomi, Program Keluarga Harapan (PKH).



PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi salah satu masalah sosial yang paling kompleks dan struktural, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ini mempengaruhi tidak hanya kondisi ekonomi tetapi juga kualitas pendidikan, hasil kesehatan, dan ketidaksetaraan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), terdapat 24,06 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia, mencerminkan ketimpangan akses terhadap sumber daya. Sebagai tanggapan, pemerintah menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program transfer tunai bersyarat yang menargetkan keluarga terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Kemensos RI, 2024).

World Bank (2024) menegaskan bahwa program seperti PKH menjadi semakin kritis pascapandemi untuk mencegah 'scarring effect' kemiskinan jangka panjang. Namun, studi ini juga mengingatkan risiko ketergantungan jika tidak diimbangi dengan strategi pemberdayaan—sebuah tantangan yang terlihat pada KPM di Dramaga yang tetap menerima bantuan selama bertahun-tahun tanpa peningkatan signifikan. Program serupa telah berhasil mengurangi kemiskinan di negara lain, seperti Bolsa Família di Brasil dan Progres/Oportunidades di Meksiko (exemplars, 2022; Nuryana, 2014; World Bank, 2014). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah menjangkau lebih dari 10 juta rumah tangga penerima manfaat (Kementerian Sosial RI, 2024). Ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti keluarga dengan wanita hamil, anak-anak kecil, anak-anak usia sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, mengurangi beban keuangan rumah tangga, mempromosikan inklusi keuangan, mendorong perubahan perilaku, dan menumbuhkan kemandirian, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan (Kementerian Sosial RI 2020).

Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan IDR 36,9 triliun untuk 10 juta keluarga PKH (Kementerian Sosial RI, 2020a). Peningkatan pendanaan diharapkan dapat

mempercepat pengentasan kemiskinan. Namun, dalam praktiknya, beberapa keluarga telah tetap dalam program tersebut selama lebih dari sembilan tahun tanpa perbaikan sosial-ekonomi yang signifikan. Data dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial menunjukkan bahwa dari tahun 2007 hingga 2019, 177.045 keluarga terus menerima manfaat PKH, dan 125.802 keluarga telah berada dalam program sejak tahun 2008 (Kusumaningrum et al., 2020). Ini menimbulkan pertanyaan mengapa beberapa KPM berhasil mencapai kemandirian sementara yang lain tetap bergantung. Meskipun tujuan peningkatan bantuan adalah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, banyak penerima manfaat jangka panjang masih berjuang untuk mencapai kemandirian sosial-ekonomi.

Kemandirian sosial-ekonomi mengacu pada kemampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri, tanpa bergantung secara berlebihan pada bantuan eksternal, baik secara ekonomi maupun sosial. Kemandirian ekonomi mencakup kemampuan untuk menghasilkan pendapatan, mengelola keuangan, dan membangun mata pencaharian yang berkelanjutan (Susetyo, 2006), sementara kemandirian sosial melibatkan partisipasi aktif dalam komunitas, kepercayaan diri, dan kemampuan beradaptasi (Rubio et al., 2009). Bagi penerima PKH, mencapai kemandirian tergantung pada interaksi antara bantuan yang diterima, kesiapan individu, dan ketersediaan dukungan sosial dalam lingkungan mereka.

Beberapa studi telah meneliti upaya untuk mempromosikan kemandirian di antara penerima PKH. Suryati et al. (2023) menyoroti faktor-faktor kunci keberhasilan dalam mencapai kelulusan mandiri di Lampung Tengah, termasuk kompetensi fasilitator sosial, motivasi dan pendidikan dari koordinator program, kapasitas inovasi di antara penerima manfaat, dan dukungan dari keluarga serta pejabat desa. Demikian pula, Kusumaningrum et al. (2020) menemukan bahwa pola pikir, pengalaman masa lalu, ketekunan, disiplin, dan keterampilan manajemen keuangan secara signifikan mempengaruhi keberhasilan kelulusan dari PKH. Temuan ini menekankan

pentingnya memperkuat peran sumber daya manusia PKH dalam Sesi Pengembangan Keluarga (P2K2) untuk menumbuhkan pola pikir mandiri dan keterampilan keuangan. Salam (2022) mencatat bahwa meskipun penerima manfaat telah menggunakan dukungan PKH untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan, kemandirian ekonomi masih terbatas pada konsumsi. Strategi untuk meningkatkan kemandirian termasuk dukungan motivasional melalui P2K2, membangun kesadaran komitmen, dan memberikan pelatihan kewirausahaan untuk memungkinkan penerima manfaat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.

Meskipun berbagai studi telah mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemandirian penerima manfaat, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana PKH dipersepsikan oleh penerima dalam perjalanan mereka menuju kemandirian sosial-ekonomi. Pengalaman subjektif KPM dalam memanfaatkan bantuan, mengatasi tantangan, dan membentuk pola pikir serta keterlibatan sosial mereka masih kurang dieksplorasi. Selain itu, sejauh mana program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas finansial tetapi juga perubahan sikap dan perilaku memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam. Menggunakan pendekatan fenomenologis, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana PKH diinterpretasikan oleh para penerimanya sebagai alat pemberdayaan dan untuk memberikan informasi bagi kebijakan masa depan yang bertujuan untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, salah satu daerah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan laporan terbaru, distribusi tahap pertama bantuan sosial pada tahun 2025 terus meluas ke berbagai daerah, termasuk Bogor (Syabania, 2025). Selain itu, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia PKH di seluruh Provinsi Jawa

Barat, termasuk Dramaga, telah dilakukan sejak tahun 2020 untuk meningkatkan efektivitas program dan memperkuat dukungan bagi keluarga penerima manfaat (Kementerian Sosial RI, 2020b). Studi ini dilakukan secara offline dari Februari hingga Mei 2025 menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis untuk mengeksplorasi pengalaman hidup keluarga penerima manfaat PKH (KPM) dalam perjalanan mereka menuju kemandirian sosial-ekonomi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana KPM memandang, menafsirkan, dan memberi makna pada pengalaman mereka selama dan setelah menerima bantuan dari PKH. Peserta dipilih melalui purposive sampling dengan kriteria: (1) menerima PKH ≥ 2 tahun, (2) memiliki usaha produktif (jika sudah graduasi), (3) aktif di P2K2, dan (4) mewakili variasi usia (31–50 tahun) dan jenis pekerjaan (sektor informal).

Sebanyak tujuh informan terlibat. Wawancara mendalam dilakukan dengan dua KPM yang telah menerima manfaat selama lebih dari dua tahun dan satu KPM yang sedang mempersiapkan kelulusan. Selain itu, diskusi kelompok terfokus (FGD) diadakan dengan dua KPM jangka panjang lainnya, satu KPM yang sedang mempersiapkan kelulusan, dan satu yang sudah lulus secara mandiri. Pengumpulan data difokuskan untuk menangkap pengalaman subjektif, tantangan, respons emosional, dan makna pribadi yang terkait dengan upaya menuju kemandirian sosial-ekonomi serta partisipasi mereka dalam PKH. Data dianalisis secara tematik dengan rangkaian proses berupa reduksi data, formulasi makna, pengelompokan tema, dan interpretasi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana KPM menavigasi jalan menuju kemandirian sosial-ekonomi.

HASIL DAN DISKUSI

Bagian ini membahas secara mendalam hasil penelitian terkait Program Keluarga Harapan (PKH), berfokus pada pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap program, serta implementasi PKH dalam mendorong kemandirian ekonomi dan sosial

KPM. Analisis juga mencakup faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalan KPM dalam mencapai kemandirian tersebut, menyoroti tantangan yang dialami KPM.

Karakteristik Informan

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD, Sebagian besar informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, baik istri maupun suami, dengan jenjang pendidikan betkisar antara SD hingga SMK, dan mayoritas berpendidikan terakhir SMP. Dalam hal usia, informan umumnya berada dalam rentang 31 hingga 50 tahun, yang dikategorikan sebagai usia produktif. Meskipun demikian, tidak seluruhnya menunjukkan kesiapan fisik dan mental untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang intensif, terutama karena minimnya pengalaman kerja sebelumnya. Jenis pekerjaan yang dilakoni oleh para informan sebagian besar berada di sektor informal, seperti buruh lepas, penjual makanan ringan, tukang ojek, dan jasa laundry rumahan, dengan penghasilan tidak tetap yang umumnya berada di kisaran Rp500.000,00–Rp1.000.000,00 per bulan. Sementara itu, pengeluaran bulanan informan berkisar antara Rp1.000.000,00 hingga Rp2.000.000,00, tergantung pada jumlah anggota keluarga, kebutuhan pendidikan anak, serta biaya konsumsi harian. Jumlah tanggungan dalam satu keluarga umumnya antara empat hingga enam orang, termasuk anak-anak dan kadang anggota keluarga lansia. Kondisi ini memperlihatkan adanya beban ekonomi yang cukup besar pada sebagian besar KPM, yang berimplikasi pada pemanfaatan bantuan PKH lebih sebagai penopang kebutuhan dasar daripada sarana pemberdayaan ekonomi.

Tabel 1. Karakteristik Informan KPM PKH di Kecamatan Dramaga

Inisial	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Penghasilan /Bulan	Jml. Tanggungan
WD	48	SMP	Laundry	Rp750.000	5
DS	31	SMK	Ojek	Rp1.000.000	4
MI	37	SD	Pedagang	Rp500.000	6

Sumber: Data primer penelitian (2025)

Pemahaman KPM Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemahaman KPM terhadap PKH umumnya menunjukkan adanya kesadaran fungsional terhadap tujuan program, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Mayoritas informan mengenal PKH sebagai bantuan bersyarat bagi keluarga prasejahtera, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu informan: “DS (31) ... Bantuan untuk pendidikan, kesehatan, sama ekonomi”. Selain itu, KPM juga memahami tujuan dari PKH yakni untuk mensejahterakan rakyat, “MI (37) ... PKH itu untuk mensejahterakan, bantuan dari pemerintah, program untuk mendukung kesejahteraan rakyat”. Pemahaman KPM terhadap PKH juga semakin berkembang seiring dengan munculnya kebijakan percepatan *graduasi mandiri* yang mulai digencarkan setelah tahun 2022. Sebelum adanya kebijakan ini, sebagian besar KPM tidak memiliki dorongan yang kuat untuk keluar dari program, karena tidak terdapat arahan atau insentif khusus yang mendorong kemandirian secara aktif. Dalam konteks ini, temuan menarik muncul dari salah satu informan yang telah mengikuti program sejak tahun 2017 dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan *graduasi mandiri*. Meskipun pekerjaan yang dimiliki masih bersifat tidak tetap, informan tersebut menunjukkan niat keluar dari program karena mempertimbangkan kondisi tetangga di sekitarnya yang lebih membutuhkan. Ia menyatakan: “WD (48) ...Dapet PKH dari akhir tahun 2017... tapi sekarang sudah mau *graduasi mandiri*,” yang menunjukkan adanya kesadaran sosial dan empati sebagai dorongan personal menuju kemandirian.

Implementasi PKH dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi

Hasil wawancara dan FGD dengan sejumlah KPM PKH menunjukkan bahwa bantuan tunai bersyarat ini dinilai cukup membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama dalam hal pendidikan anak. Mayoritas informan menggunakan dana PKH untuk kebutuhan sekolah, seperti seragam, perlengkapan, dan ongkos harian. Seperti yang dinyatakan salah satu informan: “WD (48) ...Alhamdulillah kebantu ekonominya, uangnya

dipake buat kebutuhan sekolah, beli pakaian sekolah, ongkos buat ke sekolah,” yang menegaskan bahwa orientasi penggunaan bantuan lebih bersifat konsumtif dan jangka pendek. Sementara itu, pemanfaatan bantuan untuk tujuan produktif seperti usaha atau penguatan ekonomi keluarga masih sangat terbatas. Salah satu informan mengatakan, “MI (37) ...Uang PKH gak bisa dipakai buat usaha teh, paling saya bantu suami kayak ngojek-ngojek begitu... tetap jaga anak juga.”

Meskipun materi pelatihan pengelolaan keuangan telah diberikan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), tidak semua KPM dapat menerapkannya dalam praktik. Seorang informan menyampaikan, “WD (48) ...Kalo catat keuangan jarang, soalnya langsung dipake buat kebutuhan sekolah aja... yang mau dicatat nggak ada jadi pusing sendiri.” Bahkan, realitas ekonomi yang minim membuat pelatihan tersebut kurang aplikatif, seperti yang diungkapkan, “DS (31) ...Ada teh, tiap bulan ada pendampingan... tapi ya cuma sampai itu teh, kalo gak ada duitnya juga gimana mau ngelolanya.” Dari sisi kesiapan untuk graduasi mandiri, hanya sebagian kecil KPM menyatakan siap secara mental, “WD (48) ...Alhamdulillah saya siap secara mental, masak kita hidup nggak dikasi rejeki,” namun belum secara ekonomi, “DS (31) ...Belum teh, kan suami saya kerjanya masih serabutan... kalo bisa seterusnya saja dapet PKH sampai anak-anak gede.” Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun PKH berkontribusi pada pengurangan beban jangka pendek, terutama pendidikan anak, namun pencapaian kemandirian ekonomi masih membutuhkan intervensi tambahan yang lebih kontekstual seperti keluasaan akses pada lapangan pekerjaan.

Peran PKH dalam Membangun Kemandirian Sosial KPM

Peningkatan Partisipasi dan Interaksi Sosial

Bagi KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi sosial. Para informan menyatakan bahwa keterlibatan dalam PKH, seperti pertemuan rutin P2K2 dan pelatihan keterampilan, menjadi titik awal keterlibatan

mereka dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu informan mengungkapkan bahwa dirinya mulai aktif mengikuti pelatihan menjahit setelah mendapatkan informasi dari pendamping, “WD (48) ...Saya ikut cuma pelatihan menjahit doang, dikasih tau sama pendamping siapa yang mau ikut ada pelatihan menjahit, jadi saya daftar.” Informan lain menyebut bahwa keterlibatan dalam kegiatan sosial meningkat sejak menjadi peserta PKH, “MI (37) ...Ya ada, awalnya cuma Ibu RT di rumah saja tapi sekarang ada pendampingan tiap bulan jadi ada kumpul-kumpul begitu teh.” Dengan demikian, PKH berfungsi sebagai media untuk membangun konektivitas sosial serta memperluas ruang partisipasi masyarakat marginal secara aktif dan bermakna.

Peran Strategis Pendamping PKH

Bagi KPM, Pendamping PKH memainkan peran penting dalam mendorong kemandirian sosial mereka, baik dari sisi administratif maupun penguatan kapasitas personal dan keluarga. Informan secara konsisten menilai keberadaan pendamping sebagai hal yang penting, tidak hanya membantu proses pencairan bantuan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan keluarga. Seorang informan menyatakan, “MI (37) ...Penting teh, apalagi kalau misalkan ada pencairan yang terlambat. Terus juga dari pendamping diajarin tentang menjaga ketahanan keluarga.” Hal serupa diungkapkan oleh informan lainnya, “DS (38) ...Penting teh, pendampingan semakin nambah pengetahuan... kalau ada masalah sama pencairan bisa langsung ke pendamping... sangat terbantu.” Temuan ini menunjukkan bahwa pendamping bukan sekadar fasilitator teknis, melainkan agen transformasi sosial yang turut memperkuat kapasitas adaptif KPM dalam menjalani kehidupan sosial mereka.

Dinamika Stigma Sosial

Walaupun membawa manfaat, PKH juga memunculkan dinamika stigma sosial yang dialami sebagian KPM. Pandangan negatif dari masyarakat, terutama dari mereka yang tidak menerima bantuan, kerap menciptakan tekanan psikologis bagi penerima. Seorang informan

menyampaikan, “WD (48) ...*Sering dibilangin, itu lagi itu lagi yang dapet... saya juga mau ngundurin diri.*” Bahkan stigma internal dari sesama penerima juga muncul, seperti yang dialami oleh informan lain, “DS (38) ...*Pernah ada, tapi sesama penerima begitu teh dia bilang 'Ih si DS menang bantuan PKH aja'.*” Stigma ini tidak hanya menurunkan motivasi sosial, tetapi juga berpotensi memicu niat mengundurkan diri dari program. Namun demikian, tidak semua KPM mengalami stigma tersebut, beberapa informan menyatakan bahwa mereka tidak merasakan tekanan sosial karena kondisi sosial lingkungan yang seragam. “MI (37) ...*Gak ada sih teh, soalnya di sini banyak juga yang dapat PKH,*” ujar salah satu informan. Temuan ini memperlihatkan bahwa persepsi terhadap stigma sangat kontekstual dan bergantung pada lingkungan sosial penerima.

Pertumbuhan Empati dan Solidaritas Sosial

Menariknya, selain memperluas partisipasi, PKH juga menumbuhkan nilai-nilai empati dan solidaritas sosial dalam diri KPM. Meskipun dalam keterbatasan, sebagian informan menunjukkan keinginan untuk berbagi dan menyadari adanya kelompok lain yang lebih membutuhkan. “DS (38) ...*Dulu biasanya cuma bisa lihat orang dikasih bantuan, sekarang dapat bantuan alhamdulillah bisa berbagi ke tetangga teh ya walaupun cuma makanan begitu,*” ungkap salah satu informan. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan tidak sekadar bersifat konsumtif, melainkan juga membentuk nilai sosial yang memperkuat kohesi antar warga. Lebih lanjut, pertumbuhan empati ini juga tercermin dalam keputusan sebagian KPM untuk secara sukarela melakukan graduasi mandiri demi memberikan kesempatan kepada warga lain yang belum mendapatkan bantuan. Seperti disampaikan oleh informan, “ARD (50) *Kasian buat yang lain, buat kasih kesempatan gitu,*” pernyataan ini mencerminkan bahwa keputusan untuk keluar dari program tidak semata-mata dilandasi oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh dorongan moral dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, empati tidak hanya menjadi perasaan personal, tetapi bertransformasi menjadi tindakan konkret yang mencerminkan kesadaran kolektif. Temuan ini menunjukkan bahwa PKH telah berhasil memfasilitasi ruang

sosial yang mendorong tumbuhnya etika berbagi dan solidaritas, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat prasejahtera yang sebelumnya lebih sering diasosiasikan dengan ketergantungan terhadap bantuan.

Perubahan Identitas Sosial dan Kepercayaan Diri

Bagi KPM, PKH juga berdampak pada perubahan identitas sosial dan peningkatan rasa percaya diri. Beberapa informan menyebut bahwa setelah menjadi bagian dari program, mereka merasa lebih dihargai dan dipercaya oleh masyarakat. Seorang informan menyatakan, “MI (37) ...*Mungkin ini sih teh, karena sekarang jadi wakilnya di sini jadi lebih sering dihubungi sama KPM atau sama tetangga, bisa bantu sesama juga merasa dapat dipercaya begitu teh.*” Informan lain menuturkan, “DS (38) ...*Iya teh bisa lebih bersosialisasi, agak percaya diri ke masyarakat ke tetangga terutama.*” Namun demikian, kepercayaan diri ini tidak selalu bebas dari tekanan emosional, karena sebagian KPM juga masih merasakan rasa malu dan bersalah, terutama saat menerima bantuan secara terbuka di tengah masyarakat. “WD (48) ...*Ada rasa malunya juga sih, kalau lagi ngambil suka diomongin... nggak enak,*” ucap salah satu informan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses perubahan identitas sosial di antara KPM bersifat dinamis dan kompleks, diwarnai oleh dorongan positif dari program dan tantangan psikososial dari lingkungan sekitar.

Faktor Penentu Keberhasilan atau Kegagalan KPM dalam Mewujudkan Kemandirian Sosial Ekonomi

Tantangan Ekonomi dan Sosial

Tantangan ekonomi muncul sebagai hambatan paling nyata yang dirasakan oleh hampir seluruh informan. Mayoritas KPM menyatakan bahwa penghasilan keluarga yang tidak stabil, ditambah dengan keterbatasan pendidikan dan usia produktif, menghambat mereka dalam mengelola bantuan secara produktif. Salah satu informan menjelaskan, “DS (37) ...*Lebih ke tantangan ekonomi sih teh, soalnya kan saya suami cuma tamatan SMP dan umur juga sudah segini, jarang mau nerima teh, jadi kerjanya yang ada saja serabutan.*” Hal ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa faktor

struktural seperti pendidikan rendah dan kurangnya peluang kerja tetap menjadi hambatan mendasar dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (Rosana, 2019; Saputri et al., 2025). Selain itu, tekanan sosial juga muncul dari komunitas sekitar yang tidak selalu mendukung langkah KPM untuk mandiri. Seorang informan mengungkapkan, “WD (48) *...Banyak yang mengaruhi saya jangan keluar gitu, ah tapi biarin saya udah tekat pengen keluar*”. Dinamika ini menunjukkan adanya resistensi sosial yang kadang justru memperlambat proses graduasi mandiri, terutama ketika lingkungan tidak mendukung perubahan status kesejahteraan individu (van de Weijer et al., 2022).

Kesadaran Diri dan Nilai Empati

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini bahwa kesadaran diri (*self-awareness*) dan nilai empati sosial (*social empathy*) muncul sebagai pemicu internal yang kuat dalam mendorong KPM menuju graduasi mandiri. Beberapa informan menyatakan bahwa keputusan untuk keluar dari program PKH tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi, melainkan lahir dari refleksi sosial dan moral. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan, “NK (31) *Kita perlu punya kesadaran dulu... orang-orang di sana banyak yang butuhin lebih dari kita, liatnya juga kasian, mending mereka yang dapet*”. Ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas internal dan nilai kemanusiaan. Individu yang memiliki *self-awareness* dan *social empathy* lebih cenderung mengambil keputusan untuk mandiri sebagai bentuk tanggung jawab sosial (Antonopoulou, 2024). Individu yang memiliki tingkat kesadaran sosial tinggi lebih mungkin untuk mengambil keputusan mandiri sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral terhadap komunitasnya.

Namun demikian, temuan ini juga memperlihatkan bahwa kesadaran diri belum tentu sepenuhnya diiringi oleh kesiapan ekonomi. Beberapa informan menunjukkan bahwa meskipun secara moral merasa siap untuk keluar dari program, secara ekonomi

mereka masih menghadapi keterbatasan yang signifikan. Seorang informan menyampaikan, “EM (34) *...Kalau nanti mungkin kalau udah mapan ya,*” yang menunjukkan bahwa ada pertimbangan realistis mengenai kondisi ekonomi keluarga sebelum mengambil keputusan untuk graduasi. Hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara dorongan etis untuk memberi kesempatan kepada yang lebih membutuhkan dan kekhawatiran praktis mengenai ketahanan ekonomi pasca-graduasi. Dengan demikian, keberhasilan graduasi mandiri dipengaruhi oleh perpaduan antara kesiapan internal (kesadaran dan empati) dan kondisi eksternal (stabilitas ekonomi dan akses peluang), yang keduanya harus diperkuat secara seimbang dalam strategi pemberdayaan.

Temuan ini sejalan dengan teori kesejahteraan Sen (1999) yang menekankan bahwa kemandirian memerlukan dua aspek: (1) *Capability* (akses pada sumber daya seperti pendidikan, pelatihan, dan modal) dan (2) *Agency* (motivasi individu untuk mengambil keputusan). PKH selama ini baru memenuhi aspek pertama melalui bantuan tunai, tetapi kurang mendorong kapasitas *agency* KPM. Padahal, contoh informan WD (48) yang siap graduasi meski penghasilan tidak tetap menunjukkan bahwa dorongan moral (*agency*) bisa menjadi penggerak mandiri, meski tanpa dukungan ekonomi memadai. Oleh karena itu, program pendampingan PKH perlu dirancang untuk memperkuat kedua aspek ini secara seimbang.

Peran Pendamping

Peran pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki posisi strategis sebagai salah satu faktor yang dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat dalam proses kemandirian sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di satu sisi, informan menilai pendamping sebagai figur penting yang memberikan motivasi, edukasi, dan dukungan psikososial dalam proses menuju graduasi mandiri. Seorang informan menyatakan, “WD (48) *Pendamping suka ngasih masukan, kalau ibu-ibu udah punya usaha sendiri silakan kalau mau keluar... terus kalau ada apa-*

apa selalu didukung,” yang menunjukkan bahwa keberadaan pendamping dapat memperkuat rasa percaya diri dan mendorong refleksi keputusan mandiri. Dalam konteks ini, pendamping berperan sebagai *social support* yang membangun kapasitas adaptif dan kepercayaan diri KPM untuk keluar dari ketergantungan bantuan.

Namun demikian, tidak semua pengalaman KPM terhadap pendamping bersifat positif. Sudah dua kali dilakukan perubahan pendampingan oleh beberapa informan, kualitas pendampingan dinilai tidak konsisten dan sangat bergantung pada karakter pribadi pendamping itu sendiri. Salah satu informan menyampaikan, “NK (31) *Beda... orang yang berbeda. Pak HR itu orangnya baik, pendamping yang cewek itu dimusuhin sama KPM, gak sebaik Pak HR,*” yang menyoroti adanya perbedaan pendekatan dan respons pendamping terhadap peserta. Bahkan, dalam konteks proses graduasi, sebagian KPM merasa dibiarkan tanpa arahan yang jelas. “EM (34) *...Kayaknya kalau suruh graduasi sendiri kayaknya susah ya, mungkin. Mendingan dari pendampingnya aja pilih-pilih,*” ungkap seorang informan, menunjukkan bahwa pendamping belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai fasilitator aktif dalam mendorong kesiapan peserta.

Dengan demikian, peran pendamping dapat menjadi katalisator perubahan ketika dilakukan secara empatik dan suportif, namun juga berpotensi menjadi penghambat ketika komunikasi dan keterlibatan bersifat pasif atau tidak responsif terhadap kebutuhan peserta (Suryati et al., 2023). Evaluasi terhadap kapasitas dan pendekatan kerja pendamping menjadi krusial untuk memastikan efektivitas peran mereka dalam pemberdayaan KPM secara berkelanjutan.

Keterbatasan Struktural Program

Keterbatasan struktural dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu hambatan utama dalam mendorong kemandirian sosial ekonomi KPM. Beberapa informan mengungkapkan keluhan terkait aspek teknis program, seperti nominal bantuan yang dianggap terlalu kecil serta pencairan dana yang tidak tepat waktu. Seorang

informan menyatakan, “DS (48) *...nominalnya masih kurang, pencairan kadang terlambat, jadi mungkin bisa lebih ditepatin lagi,*” yang menunjukkan bahwa ketidakteraturan pencairan bantuan berdampak pada kemampuan keluarga dalam merencanakan pengeluaran. Selain itu, proses graduasi mandiri juga belum berjalan optimal karena minimnya pendampingan. “EM (34) *...kayaknya kalau suruh graduasi sendiri kayaknya susah ya, mungkin. Mendingan dari pendampingnya aja pilih-pilih,*” keluh seorang informan, yang menunjukkan bahwa KPM merasa belum cukup siap untuk mengambil keputusan mandiri tanpa bimbingan atau kerangka mekanisme yang jelas.

Di samping tantangan teknis, persoalan tata kelola program di tingkat komunitas juga menjadi sorotan penting. Praktik penyalahgunaan wewenang, seperti penguasaan kartu ATM penerima oleh pihak lain, menunjukkan lemahnya pengawasan dalam distribusi bantuan. “EM (34) *...Ada ketua lain yang suka megang kartu warga... Gimana kalau misalkan dia gesek, kita nggak tahu yang punya warga. Itu ada kejadian soalnya,*” jelas seorang informan. Hal ini tidak hanya menimbulkan potensi kerugian materi bagi KPM, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman dan tidak percaya terhadap sistem distribusi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas PKH sangat bergantung pada kualitas tata kelola, mulai dari aspek administratif hingga transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal. Oleh karena itu, perbaikan teknis dan penguatan sistem pengawasan menjadi prasyarat penting agar PKH benar-benar mampu menjadi instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan dan adil (Halim & Hakim, 2024).

Dukungan Keluarga dan Lingkungan

Dukungan dari keluarga inti menjadi faktor penting yang dapat mendorong maupun menghambat kemandirian sosial ekonomi KPM, tergantung pada kondisi internal masing-masing keluarga (Rahmawati, 2021). Dalam beberapa kasus, keterbatasan peran pasangan sebagai pencari nafkah justru menjadi hambatan yang signifikan dalam proses menuju graduasi mandiri. Seorang informan menyampaikan, “MI (37) *... Kurang pemasukan karena cuma dari suami yang kerjanya belum tetap teh,*” yang

menunjukkan bahwa pendapatan keluarga yang tidak stabil membuat KPM masih sangat bergantung pada bantuan PKH. Ketidakpastian penghasilan membuat keluarga sulit merencanakan keuangan jangka panjang atau membangun usaha produktif secara mandiri. Dengan demikian, meskipun ada struktur keluarga inti yang mendukung, realitas ekonomi di dalamnya belum cukup kuat untuk menopang kemandirian.

Di sisi lain, dukungan emosional dari anggota keluarga kadang berperan sebagai pendorong internal. Seperti diungkapkan oleh informan lain, "DS (48) ... *Anak mendukung keputusan untuk graduasi setelah merasa cukup,*" yang menunjukkan bahwa kesadaran dan dorongan dari lingkungan terdekat dapat memperkuat motivasi KPM untuk keluar dari program. Namun, secara umum, keterbatasan dukungan dari pihak eksternal masih menjadi hambatan yang sering disampaikan. Pendamping program, meskipun memiliki peran penting, dinilai belum optimal dalam memfasilitasi proses pemberdayaan. "MN (40) ...*Gak ada, pendamping cuma kasih materi dan dukungan saja biar bisa mandiri, tapi pendamping gak memaksa kami,*" keluh seorang informan. Ketiadaan intervensi lanjutan seperti pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan dukungan kewirausahaan dari sektor lain menunjukkan bahwa ekosistem pemberdayaan di luar program PKH belum sepenuhnya mendukung proses kemandirian KPM (Fatoni, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya bersifat fungsional, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan anak. Namun, pemahaman tersebut cenderung berkembang secara bertahap seiring dengan kebijakan percepatan graduasi mandiri yang mulai digencarkan pada tahun 2022. Sebelum kebijakan ini, minimnya arahan dan insentif yang jelas menyebabkan banyak KPM tidak memiliki dorongan untuk keluar dari program. Menariknya, beberapa informan

menunjukkan inisiatif pribadi untuk melakukan graduasi mandiri, meskipun secara ekonomi belum sepenuhnya mapan, sebagai bentuk empati sosial terhadap warga lain yang lebih membutuhkan. Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi untuk mandiri tidak selalu ditentukan oleh kesiapan ekonomi semata, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial dan kesadaran kolektif.

Di sisi lain, implementasi PKH menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam aspek sosial, seperti peningkatan partisipasi, terbentuknya solidaritas, dan transformasi identitas sosial KPM. PKH berperan sebagai ruang pembelajaran sosial yang memungkinkan peserta memperluas interaksi dan memperkuat koneksi komunitas. Namun, pencapaian kemandirian ekonomi masih terbatas dan menghadapi banyak hambatan, seperti minimnya akses terhadap lapangan pekerjaan, tidak stabilnya penghasilan, dan rendahnya literasi keuangan. Peran pendamping menjadi krusial, baik sebagai pendorong maupun penghambat, tergantung pada pendekatan dan kualitas interaksi yang dibangun. Selain itu, tantangan struktural program seperti pencairan yang tidak tepat waktu, besaran bantuan yang terbatas, serta lemahnya pengawasan di tingkat lokal turut mempengaruhi efektivitas program. Oleh karena itu, keberhasilan PKH dalam mendorong kemandirian sosial ekonomi memerlukan pendekatan yang lebih holistik, berbasis komunitas, dan terintegrasi dengan dukungan lintas sektor.

Lebih lanjut, keberhasilan maupun kegagalan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mencapai kemandirian sosial ekonomi melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Tantangan ekonomi seperti penghasilan tidak tetap, rendahnya tingkat pendidikan, serta usia yang tidak lagi produktif menjadi hambatan utama dalam memanfaatkan bantuan secara produktif. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga menimbulkan resistensi terhadap upaya graduasi mandiri. Namun, temuan juga menunjukkan bahwa kesadaran diri dan nilai empati sosial berperan penting sebagai pemicu internal bagi sebagian KPM untuk secara

sukarela keluar dari program, meskipun belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan ekonomi. Peran pendamping terbukti strategis, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada pendekatan personal, konsistensi, dan kemampuan membangun hubungan yang suportif; dalam beberapa kasus, pendamping justru menjadi hambatan akibat kurangnya arahan atau komunikasi. Keterbatasan struktural program, termasuk nominal bantuan yang rendah, pencairan yang tidak tepat waktu, dan lemahnya pengawasan lokal, semakin memperlemah efektivitas PKH sebagai instrumen pemberdayaan. Dukungan dari keluarga inti dan lingkungan juga bersifat ambivalen; dapat menjadi pendorong ketika ada kerja sama internal, namun menjadi penghambat saat kondisi ekonomi rumah tangga masih sangat rentan dan tidak ada dukungan eksternal yang memadai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan jangka panjang PKH, strategi pemberdayaan harus memperkuat kapasitas internal KPM sekaligus memperbaiki ekosistem pendukung yang ada di tingkat komunitas dan kelembagaan.

Seperti diperingatkan World Bank (2024), program perlindungan sosial harus berfokus pada 'graduasi berkelanjutan' dengan memadukan bantuan tunai, pelatihan keterampilan, dan akses pasar. Temuan kami tentang minimnya pemanfaatan dana PKH untuk usaha produktif memperkuat rekomendasi ini. Dengan demikian, PKH perlu dikembangkan sebagai program yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonopoulou, H. (2024). The value of emotional intelligence: Self-awareness, self-regulation, motivation, and empathy as key components. *Technium Education and Humanities*, 8, 78–92. <https://doi.org/10.47577/teh.v8i.9719>
- Badan Pusat Statistik. (2024, Januari 15). *Persentase penduduk miskin September 2024 turun menjadi 8.75 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>
- Exemplars. (2022, September 1). New research highlights Progres's legacy 20 years on: Beneficiaries are earning more. *Exemplars.Health*. <https://www.exemplars.health/stories/new-research-highlights-progresas-legacy-20-years-on>
- Fatoni, A. (2024). *Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari perspektif gender di Kota Mataram* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram]. <https://etheses.uinmataram.ac.id/7852/1/Ahmad%20Fatoni%20200302045.pdf>
- Halim, W., & Hakim, A. (2024). Ketergantungan masyarakat miskin dan dilema kebijakan sosial: Studi pada implementasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7(2), 97–112. <https://doi.org/10.33701/jkp.v7i2.4616>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Rencana strategis KEMENSOS*. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15995730687808.pdf>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020a). *Kemensos siapkan aturan pendukung percepatan graduasi KPM PKH*. <https://kemensos.go.id/berita-terkini/direktorat-jenderal-perindungan-dan-jaminan-sosial/kemensos-siapkan-aturan-pendukung-percepatan-graduasi-kpm-pkh>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020b). *Kualitas SDM PKH se-Provinsi Jawa Barat terus ditingkatkan*. <https://kemensos.go.id/berita-foto/direktorat-jenderal-linjamsos/kualitas-sdm-pkh-se-provinsi-jawa-barat-terus-ditingkatkan>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). *Penyaluran PKH hingga akhir Mei telah tercapai seratus persen*. <https://kemensos.go.id/index.php/berita-terkini/menteri-sosial/penyaluran-pkh-hingga-akhir-mei-telah-tercapai-seratus-persen>
- Kusumaningrum, R., Nugroho, F., & Alfrojems. (2020). Faktor-faktor keberhasilan keluarga penerima manfaat untuk mencapai graduasi dari Program Keluarga Harapan. *Jurnal PKS*, 19(3), 265–276.

- Nuryana. (2014). Bolsa Familia: Program transfer tunai bersyarat untuk pengurangan kemiskinan di Brazil. *Sosio Informa*, 19(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v19i1.27>
- Rahmawati, I. (2021). *Implementasi kebijakan graduasi dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs): Studi kasus pada PKH di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waykanan Tahun 2021* [Skripsi, Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/61128/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Rocket%20Digital%20%2821%29.pdf>
- Rosana, E. (2019). Kemiskinan dalam perspektif struktural fungsional. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), 19–34. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4483>
- Rubio, E., Lázaro, A., & Sánchez-Sánchez, A. (2009). Social participation and independence in activities of daily living: A cross-sectional study. *BMC Geriatrics*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/1471-2318-9-26>
- Salam, P. R. (2022). *Potret program keluarga penerima manfaat (KPM) Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa* [Skripsi, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/24030/>
- Saputri, M. A., Millah, M. N., Falah, R. N., & Dewi, S. A. (2025). Strategi pengentasan kemiskinan: Tantangan dan peluang dalam mewujudkan SDGs di Indonesia. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Suryati, L., Ranga, K., Indriyani, Y., Sayekti, W., & Syarief, Y. (2023). Faktor-faktor pendorong dan penghambat graduasi sejahtera mandiri keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Tengah. *Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development*, 5(2), 112–122.
- Susetyo, B. (2006). *Teologi ekonomi: Partisipasi kaum awam dalam pembangunan menuju kemandirian ekonomi*. Avverroes Press.
- Syabania, M. (2025, Januari). Update terbaru: Penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 1 meluas ke berbagai daerah, warga Bogor termasuk? *Radarbogor.jawapos.com*. <https://radarbogor.jawapos.com/nasional/2475653905/update-terbaru-penyalaran-bansos-pkh-dan-bpnt-tahap-1-meluas-ke-berbagai-daerah-warga-bogor-termasuk>
- van de Weijer, M. P., Baselmans, B. M. L., Hottenga, J. J., Dolan, C. V., Willemsen, G., & Bartels, M. (2022). Expanding the environmental scope: An environment-wide association study for mental well-being. *Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology*, 32(2), 195–204. <https://doi.org/10.1038/s41370-021-00346-0>
- World Bank. (2014, November 19). *A model from Mexico for the world*. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/19/un-modelo-de-mexico-para-el-mundo>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023a). *Panduan pendampingan PKH berbasis pemberdayaan*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023b). *Evaluasi dampak PKH 2023*.
- World Bank. (2024). *Social protection in post-pandemic era*. World Bank Group.